

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan untuk Penataan Investasi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dicabut sebagian oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 P/HUM/2024 Pengujian PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2018, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun-2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*

Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Tahun 2019

Native Title Act 1993 - Federal Register of Legislation

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konpress.
- _____. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Barkatullah, Abdul Halim, dkk. 2017. *Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*. Bandung: Nusa Media.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hayati, Tri. 2012. *Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah: Studi pada Pertambangan Timah di Pulau Bangka*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hayati, Tri, dkk. 2005. *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius.
- Kania Winayanti, Nia. 2011. *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Klappstein, Verena dan Maciej Dybowski, 2018, *Ratio Legis Philosophical and Theoretical Perspectives*, Gewerbestrasse: Springer International Publishing AG.
- Locke, John. 2003. *Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration*. New Haven and London: Yale University Press.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Pascasarjana UNS.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Pasek, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rawls, John. 2008. *A Theory of Justice: Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sardjono, Agus, et al. 2016. *Pengantar Hukum Dagang*. Cet. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saifullah. 2004. *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang.
- Salim, H.S. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2017. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Soehino. 2008. *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 15.

Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soimin. 2010. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia*. Yogyakarta.

Sulastiana, dan Oswari, T., 2024, *Hukum Bisnis*, Solok: Penerbit Mafy

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tatiek Sri Djatmiati. 2010. *Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*. Dalam Muhadi (Ed.), *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Trijono, Rachmat. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Yuliantri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zulkarnain, Iskandar, dkk. 2007. *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

Jurnal dan Prociding

Ajie, R. 2016. *Batasan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang (open legal policy) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tafsir putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Hukum Legislasi Indonesia*, 13(2).

Anto, F., Widyaningsih, F. N., Suratman, & Muhibbin, M. 2022. *Ratio legis unsur tanpa hak dalam perundangan tentang penggunaan senjata tajam di Indonesia*. *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(2).

Arinandaa, Z. D., dan Aminah, A. 2021. *Sentralisasi kewenangan pengelolaan dan perizinan dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).

Asilah, A. T., dan Sugiyono, H. 2020. *Kepastian hukum izin usaha pertambangan khusus/IUPK (Studi: IUPK sebagai kelanjutan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dalam UU Minerba)*. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1).

Astinda, A. N. R., dkk. 2024. *Konflik regulasi dan masalah kelayakan pada kebijakan izin usaha pertambangan bagi ormas keagamaan*. *Jurnal USM Law Review*, 7(3).

Astuti, D. R., dan Wibisono, M. Y. 2022. *Tinjauan sejarah atas peran organisasi kemasyarakatan Islam pada pembangunan Indonesia*. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(1).

- Astuti, S. A., dan Simandjuntak, A. 2020. *Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara berdasarkan prinsip keadilan di Kalimantan Timur*. Jurnal De Facto, 5(2).
- Bernike, G., dkk. 2024. *Tinjauan yuridis pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024*. Padjadjaran Law Review, 12(2).
- Darongke, F., dkk. 2020. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral di Indonesia*. Jurnal Lex Privatum, 10(3).
- Fatah, D. 2013. *Teori keadilan menurut John Rawls*. Jurnal UIN Raden Intan Lampung, 9(2).
- Federova, S. L., Prameswari, M., & Anjani, T. 2025. *Problematika pemberian kewenangan izin usaha pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(3).
- Ghufranillah, D., dkk. 2022. *Telaah kedudukan organisasi kemasyarakatan dalam sistem ketatanegaraan ditinjau dari asas kedaulatan rakyat*. Res Publica, 6(3).
- Haris, O. K. 2015. *Pembadanan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP)*. Perspektif Hukum, 15(2).
- Hayati, T. 2019. *Hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan implikasinya terhadap bentuk perusahaan pertambangan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(3).
- Husen, A. 2019. *Eksistensi Peraturan Presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan*. Lex Scientia Law Review.
- Listiyani, N. 2017. *Impact of mining on life environment in South Kalimantan and implication for rights of citizens*. Jurnal Al'Adl, 9(1).
- Lumintang, C. V. 2020. *Aspek hukum pemberian izin usaha bisnis pertambangan mineral dan batubara di Indonesia*. Lex Et Societatis, 8(4).
- Mawuntu, J. R. 2012. *Konsep penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Unsrat, 20(3).
- Muhlas, Nur Rizkiya dan Amirullah, 2024, *Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran WIUPK dan IUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan*, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2024 (*Kebijakan Pengelolaan Pertambangan: Perspektif Transendental*)
- Mursitama, T. N. 2011. *Pengkajian hukum tentang peran dan tanggung jawab organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Kemenkumham RI.
- Nasir, M., dkk. 2023. *Kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1).

- Nugroho, W. 2019. *Kebijakan pengelolaan tambang dan masyarakat hukum adat yang berkeadilan ekologis*. Jurnal Konstitusi, 15(4).
- Prameswari, Z. W. A. W. 2019. *Ratio legis dan dampak pengaturan kewarganegaraan ganda dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(3).
- Pramono, W. I., dan Munandar, A. I. 2020. *Peran Undang-Undang Ormas terhadap konflik antar ormas*. Jurnal Ilmiah Living Law, 12(1).
- Prastika, A., Putri, M. F. I., & Tasya, V. N. 2024. *Urgensi pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan "keagamaan" di Indonesia: Analisis regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024*. Taruna Law: Journal of Law and Syariah, 2(2).
- Putri, A. 2025. *Disharmoni peraturan penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) pasca diprioritaskan terhadap badan usaha organisasi kemasyarakatan "keagamaan"*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 1(1).
- Rachman, & Tunggari. 2024. *Kontradiksi pengaturan penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus terhadap badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan*. Jurnal Ilmu Hukum The Juris, 8(1).
- Santoso, H. A. 2021. *Perspektif keadilan hukum teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU "PTB"*. Jurnal Jatiswara.
- Saprii, R. B. S., dkk. 2024. *Ambiguitas pengaturan penawaran WIUPK secara prioritas terhadap badan usaha milik ormas keagamaan*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 11(1).
- Satriawan, I., dan Lailam, T. 2019. *Open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan pembentukan undang-undang*. Jurnal Konstitusi, 16(3).
- Setiadi, W. 2012. *Pembangunan hukum dalam rangka peningkatan supremasi hukum*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1).
- Soleh, A. K. 2004. *Mencermati teori keadilan sosial John Rawls*. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, 5(1).
- Surya, T. A., & Suryawan, A. A. 2024. *Pelibatan ormas keagamaan dalam mengelola tambang*. Jurnal Info Singkat, 18(15).
- Suryadi, M., & Kusuma, G. J. 2019. *Pengelolaan air asam tambang dari dinding penambangan sebagai alternatif penanggulangan pencemaran lingkungan: Studi kasus tambang Batu Hijau Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Sosioteknologi, 18(3).
- Triyanto, G. 2017. *Ratio legis perbedaan rumusan delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Rechtsens, 6(1).
- Wibowo, M. 2015. *Menakar konstitusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang*. Jurnal Konstitusi, 12(2).
- Wibowo, S. E. 2018. *Memahami makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perihal penguasaan oleh negara terhadap*

sumber daya alam. Jurnal Legislasi Indonesia, 12(4).

Skripsi, Tesis, Disertasi

Foni Vebrilioni, 2012. *Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara Melalui Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertambangan Batubara*, Tesis Universitas Indonesia Jakarta.

Anastasia Avent Sudiro dan Nindyo Pramono, 2024 *Rasio Legis dan Kepastian Hukum dari Pengaturan Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Makalah dan Internet

Achmad Dwi Afriyadi. *Terkuak! Ini 6 Lahan Tambang yang Bakal Dikelola Ormas Keagamaan*. <https://finance.detik.com/energi/d-7379538/terkuak-ini-6-lahan-tambang-yang-bakal-dikelola-ormaskeagamaan>, diakses pada 28 Maret 2025

Andi F. 2024. *Risiko Izin Tambang Ormas Keagamaan: Izin Tambang dan Mandat Ormas Keagamaan*. Koran Tempo. <https://tempo.co/read/izin-tambang-dan-mandat-ormas-keagamaan>, diakses pada 7 Mei 2025

Asia Djajadiningrat. 2003. *Batubara: Banyak Pula Manfaatnya*. Kompas
CNN Indonesia. *Daftar 6 Lahan Tambang Jatah Ormas Agama Bekas Grup Bakrie*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240610093713-85-1107855/daftar-6-lahan-tambang-jatahormas-agama-nu-dapat-bekas-grup-bakrie>, diakses pada 28 Maret 2025

Firda Dwi Muliawati. 2024. *Ternyata Ini Asal Usul Ormas Dapat 'Jatah' IUP Tambang*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240521084644-4-539967/ternyata-ini-asal-usul-ormas-dapat-jatah-iup-tambang>, diakses pada 6 Mei 2025

IMA. *Kementerian ESDM Catat Ada 4634 Izin Tambang Minerba di Indonesia*. <https://ima-api.org/detail/news/mining/kementerian-esdm-catat-ada-4634-izin-tambang-minerba-di-indonesia>, diakses pada 19 Maret 2025

Kumparan News. *Masyarakat Sipil Ajukan Gugatan Ke MA Soal Izin Tambang Ormas Keagamaan*. <https://kumparan.com/kumparannews/masyarakat-sipil-ajukan-gugatan-ke-ma-soal-izin-tambang-ormas-keagamaan-23dEMmL3PRC/3>, diakses pada 20 Februari 2025

Maulandy Rizky Bayu Kencana. *Pembagian Wilayah Tambang ke Ormas Keagamaan Akan Diatur Satgas Investasi*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5629092/pembagian-wilayah-tambangke-ormas-keagamaan-akan-diatur-satgas-investasi?page=4>, diakses pada 28 Maret 2025

Metro TV. 2024. *KONTROVERSI - Hadiah Tambang Buat Ormas Agama (Video)*.

<https://www.metrotvnews.com/play/bVDCgqWr-hadiah-tambang-buat-ormas-agama>, diakses pada 8 Mei 2025

Muhammadiyah. *Anggaran Dasar Bab XI Keuangan dan Kekayaan Pasal 35.*

<https://muhammadiyah.or.id/anggaran-dasar/>, diakses pada 23 Maret 2025

Muhammadiyah. *Anggaran Dasar Bab XII Laporan Pasal 38.*

<https://muhammadiyah.or.id/anggaran-dasar/>, diakses pada 23 Maret 2025

Muhammadiyah. *Anggaran Rumah Tangga.*

<https://muhammadiyah.or.id/anggaran-rumah-tangga/>, diakses pada 26 Oktober 2024

PBNU. *Anggaran Rumah Tangga.* https://storage.nu.or.id/storage/archive/buku-saku-ad-art-nu-2022_1659492831.pdf, diakses pada 26 Oktober 2024

PGI. *Anggaran Rumah Tangga.* <https://pgi.or.id/weblama/visi-misi/>, diakses pada 26 Oktober 2024

PHDI. *Anggaran Rumah Tangga.* <https://parisada.or.id/program-umum/>, diakses pada 26 Oktober 2024

Runik Sri Astuti. *Pemberian Izin Tambang kepada Ormas Keagamaan Rawan Penyimpangan.* <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/pemberian-izin-tambang-kepada-ormas-keagamaan-rawan-penyimpangan>, diakses pada 17 Februari 2025

Sabrina Rhamadanty. *Hanya 6 Lokasi, Ormas Ramai-Ramai Ajukan Permintaan Kelola Tambang Bakal Rebutan.* <https://ima-api.org/detail/news/mining/hanya-6-lokasi-ormas-ramai-ramai-ajukan-permintaan-kelola-tambang-bakal-rebutan>, diakses pada 13 Maret 2025

Subardi. 2024. *Ormas Agama Dapat IUP, Apa Urgensinya?* <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49945/t/Subardi%3A+Ormas+Agama+dapat+IUP%2C+Apa+Urgensinya%3F>, diakses pada 12 Juni 2024

Tempo. *Aturan Pengelolaan WIUPK Eks PKP2B untuk Ormas Keagamaan: 6 Wilayah yang Diberikan Bekas Lahan Siapa?* <https://www.tempo.co/ekonomi/aturan-pengelolaan-wiupk-eks-pkp2b-untuk-ormas-keagamaan-6-wilayah-yang-diberikan-bekas-lahan-siapa--51052>, diakses pada 25 Maret 2025

T. Ade Surya. 2024. *Polemik Prioritas Penawaran WIUPK Kepada Ormas Keagamaan*, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2024-247.pdf, diakses pada 1 Juni 2024